



Benahi Kelemahan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUNGAI RAYA – Bupati Kabupaten Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan berdasarkan telaahan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 masih ditemukan kelemahan pada aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan atas pengendalian internal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Karena hal tersebutlah BPR RI Perwakilan Kalbar memberikan opini yang masih wajar sama dengan tahun sebelumnya bagi Pemerintah Kubu

Raya yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya, Kamis (17/7) saat menghadiri sidang paripurna mengenai Raporda pertianggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 di Gedung DPRD Kubu Raya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut memutusnya diperlukan tidak hanya komitmen namun yang terpenting adalah kerja keras kita bersama terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah,

Laporan pertianggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 lalu yakni pendapatan daerah daritargetsebesar Rp1,01 triliun terealisasi sebesar Rp955,67 miliar atau 94,73 persen.

“Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2013 yakni Rp948,34 miliar atau 93,97 persen dari anggaran sebesar Rp1,01 triliun. Belanja daerah tersebut terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rusman Ali juga memaparkan soal neraca

per 31 Desember 2013 dan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Neraca Kabupaten Kubu Raya menggambarkan posisi keuangan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sebagai suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

“Jumlah aset kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1,51 triliun atau meningkat sebesar Rp531,05 miliar dari tahun 2012 dan terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya,” paparnya. (ash)